

**PEMBERDAYAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
OLEH TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM MENINGKATKAN UMKM DI DESA BUNISEURI
KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

Rafi Ahmad Juansyah¹, H. S. Munir², Etih Henriyani³

Universitas Galuh, Ciamis^{1,2,3}
E-mail : ra1921811@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa permasalahan dalam Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu: Tim Penggerak PKK kurang mengusahakan terkait permodalan dana bagi para program UP2K untuk mengembangkan kegiatan usahanya, Tim Penggerak PKK belum memberikan wadah atau sarana untuk memasarkan produk yang diberdayakannya agar terarah untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia Tim Penggerak PKK terkait melakukan pemberdayaan kepada para anggota UP2K. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalan dengan optimal, hal tersebut terlihat dari 10 indikator yang dijadikan tolok ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan baik dan 7 indikator lainnya belum sesuai dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap setiap program PKK, kurangnya kerja sama antar anggota PKK, belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan dan produksi. Maka upaya yang sudah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, antara lain melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi Tim Penggerak PKK, melaksanakan kegiatan diskusi dan arahan-arahan secara langsung kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program PKK, melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens antar anggota PKK melalui berbagai kegiatan, melakukan penggalangan dana secara swadaya dari setiap anggota PKK sebagai bentuk kas PKK yang bertujuan untuk membantu menunjang pelaksanaan program PKK, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produksi.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, UP2K, PKK*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang tinggi, dengan perkembangan penduduknya sangat cepat, diperkirakan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,3% bahkan lebih. Sehingga membuat tingkat kesejahteraan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang dewasa ini sangat memprihatinkan. Menurut Badan Pusat Statistik, banyaknya warga miskin di Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Dengan demikian pemerintah berusaha membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang subyeknya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Pada dasarnya pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah sosial karena kemampuannya dalam mengakses dan mengelola sumber daya. Akan tetapi upaya penyelesaian masalah sosial dengan wirausaha sosial dengan menggunakan metode pendekatan kewirausahaan merupakan terobosan yang luar biasa. Kepedulian pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan adanya beberapa kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi

keluarga miskin yang diprogramkan pemerintah sebagai salah satu langkah yang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui kelembagaan yang bersifat lembaga departemen maupun non departemen.

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan

demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Pada era orde baru, PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang peran dan kiprahnya tidak dipertanyakan lagi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai macam kegiatan ketrampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. PKK merupakan wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan agar

secara mandiri mempunyai ketrampilan dan keahlian dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, PKK dibentuk untuk menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa: “Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.” PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah program lain yang merupakan bentuk dari pemberdayaan perempuan. PKK sendiri bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Beranggotakan ibu-ibu rumah tangga, PKK digerakkan oleh tim yang diketuai oleh isteri dari pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah).

Adapun tugas pokok PKK desa dalam memberdayakan UP2K antara lain: Pengembangan ekonomi PKK

desa bertugas mengembangkan ekonomi desa melalui program-program pengembangan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, dan pengembangan agribisnis. Sebagai organisasi yang berperan sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa, PKK memiliki beberapa kewenangan yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuannya. Beberapa kewenangan PKK desa antara lain: Melakukan pengorganisasian dan penggerakan keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, gizi, pendidikan, dan lingkungan dan ekonomi. Menghimpun dan menyalurkan sumbangan dan bantuan dalam rangka pembangunan desa. Membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi desa. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melakukan kegiatan sosial dan keagamaan dalam rangka memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran yang

diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa kewenangan PKK desa tidak menggantikan kewenangan pemerintah desa atau lembaga lainnya yang berwenang dalam hal yang sama. PKK desa harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Program UP2K bergerak dibawah koordinator Tim Penggerak PKK dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ciamis. Salah satunya kegiatan UP2K di desa Buniseuri yang telah di sahkan oleh Kepala Desa Buniseuri sesuai dengan Keputusan kepala Desa Buniseuri Nomor 141.1/Kpts.04/II2017 tentang Pemberdayaan POKJA II Tim Penggerak PKK Desa Buniseuri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Nusahiang. Kemudian programnya berjalan sejak tahun 2020 yang merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang mayoritas modalnya bersumber dari swadaya masyarakat dan bantuan dinas terkait ataupun pemerintah desa berupa dana hibah. UP2K di desa Buniseuri merupakan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat. Adapun terdapat empat kelompok usaha yang dibedakannya. Namun hanya terdapat satu kelompok yang berjalan sesuai dengan pemberdayaan yaitu kelompok Nusahiyang. Bentuk usaha yang diberdayakannya adalah produksi makanan ringan dan kerajinan berupa pembuatan produk keripik. Adanya

program UP2K-PKK di desa Buniseuri dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Hal ini diketahui dari data penduduk desa Buniseuri dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pedagang, dan produksi makanan ringan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah dengan membina keluarga menuju tata hidup ekonomis produktif, selain dari itu UP2K juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga, sebagai usaha memperluas lapangan kerja. Sasaran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki kegiatan usaha, dan berdasarkan hasil pengamatan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha.

Pemerintahan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dan PKK yang memberdayakannya telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya berupa dilakukannya pengarahannya terkait proses pemberdayaan, akan tetapi tidak semua program yang telah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buniseuri belum

menunjukkan hasil yang optimal yaitu kurangnya permodalan, pemasaran serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemberdayaan UP2K oleh Ibu-Ibu PKK dalam meningkatkan UMKM sudah ada dan sudah berjalan, namun pada kenyataannya masih mengalami hambatan peningkatan pendapatan setelah adanya dana program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) ini. Hal ini dibuktikan dari beberapa temuan, yang diantaranya:

1. Tim Penggerak PKK kurang mengusahakan terkait permodalan dana bagi para program UP2K untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah desa untuk keperluan PKK. Contohnya: PKK hanya mengandalkan modal dari bantuan dinas terkait. Sehingga pemberdayaan menjadi terhambat karena keterbatasan modal untuk menunjang pemberdayaan UP2K.
2. Tim Penggerak PKK belum memberikan wadah atau sarana untuk memasarkan produk yang diberdayakannya agar terarah untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Hal ini pun terjadi karena Tim Penggerak PKK masih melakukan pemasaran hanya di lingkungan sekitar dan kota terdekat. Sehingga dalam segi pemasaran produk yang dihasilkan belum terjual luas dan dikenal oleh masyarakat luas. Contohnya:

Pemasaran produk hasil program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) masih dipasarkan secara manual melalui warung-warung, belum dipasarkan secara online melalui marketplace.

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Tim Penggerak PKK terkait melakukan pemberdayaan kepada para anggota UP2K. Hal ini karena kurangnya kemampuan PKK dalam melakukan training kepada UP2K. Contohnya: PKK kurang memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan dan pengembangan UP2K.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan UP2K Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?”

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang artinya menggambarkan yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas.

Fokus kajian penelitian ini adalah menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:170) ada 5 (lima) Program Strategi Pemberdayaan yang terdiri dari:

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat guna

Sumber data primer yaitu informan berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Kepala Desa Buniseuri 1 orang, Ketua TP PKK 1 orang, Ketua pokja II 1 orang, Sekretaris pokja II 1 orang, Bendahara pokja 1 orang, Ketua kelompok khusus UP2K 1 orang, dan anggota UP2K 2 orang.

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari literatur dan dokumen pendukung terkait Pemberdayaan UP2K Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Pemberdayaan UP2K Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan

UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciami, Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Mardikanto dan Soebianto (2017:170) ada 5 (lima) Program Strategi Pemberdayaan yang terdiri dari:

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat guna

Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia

- a. Tim Penggerak PKK mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok UP2K secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk program UP2K secara bertahap dan berkesinambungan sejauh ini belum terlihat, hal tersebut dibuktikan dari belum adanya kegiatan pendidikan yang diterima oleh masyarakat, dalam hal ini oleh anggota program UP2K. Kegiatan

pendidikan yang dilaksanakan baru sebatas pendidikan untuk anak-anak dengan cara mengunjungi ke setiap sekolah yang ada di Desa Buniseuri, seperti PAUD dan TK. Namun sejak adanya pandemi Covid-19, kegiatan pendidikan untuk anak-anak pun baru dilaksanakan kembali oleh Tim Penggerak PKK, di mana kegiatan belajarmengajar dilakukan secara online dan baru dilaksanakan kembali secara offline beberapa bulan ke belakang. Selain itu, dilihat dari segi pengetahuan dan keterampilan dari Tim Penggerak PKK juga terlihat belum memadai, hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikannya yang masih rendah. Selain itu terkait pelatihan UP2K sudah cukup berjalan dengan dilakukannya pelatihan pembuatan kerajinan dan makanan ringan berupa pembuatan keripik. Dalam hal ini pula berkaitan dengan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atau kapasitas masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam meningkatkan kehidupannya sesuai dengan potensi dan cara mereka.

Hambatan yang timbul selama ini dalam kegiatan pendidikan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok UP2K secara bertahap dan berkesinambungan yaitu kegiatan pendidikan untuk program UP2K sejauh ini belum dilaksanakan dikarenakan kurangnya partisipasi dan antusiasme anggota

terhadap kegiatan pendidikan dengan berbagai faktor seperti sibuk dengan urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan serta sumber daya manusia dari Tim Penggerak PKK yang kurang kompeten sehingga dari segi pengetahuan dan keterampilannya belum dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan terhadap para anggota UP2K di Desa Buniseuri tersebut.

Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu Tim Penggerak PKK berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan pengetahuan berupa pembinaan yang sesuai kepada anggota UP2K Desa Buniseuri melalui kegiatan perlombaan yang dilakukan dari Pokja I sampai dengan Pokja IV serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi Tim Penggerak PKK.

Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan dengan pendapat menurut Becker (Supsiloani, 2019:25-26) bahwa:

Alat utama pengembangan dan peningkatan produktivitas manusia itu adalah kegiatan pendidikan. Di mana modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dimiliki oleh masyarakat miskin sebagai modal untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Kemampuan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan.

Senada dengan itu, Sutermeister (Sholihah dan Firdaus, 2019:44) menyatakan bahwa:

Perubahan dan peningkatan kualitas SDM dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, yaitu dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan merupakan investasi. Pandangan ini ditinjau dari sudut human capital (SDM sebagai unsur modal).

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan pendidikan, pealtihan serta pendampingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Becker dan Sutermeister, karena kegiatan pendidikan untuk program

UP2K sejauh ini belum dilaksanakan sehingga masyarakat khususnya anggota UP2K di Desa Buniseuri memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang masih rendah. Maka dari itu, kegiatan pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai faktor penentu keberhasilan terutama dalam peningkatan UMKM yang perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Tim Penggerak PKK mengadakan bimbingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok UP2K secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan bimbingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya anggota UP2K secara bertahap dan berkesinambungan sejauh ini belum terlihat, hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya program kerja yang bersifat bimbingan yang diterima oleh masyarakat sebagai anggota UP2K.

Hambatan yang timbul selama ini dalam kegiatan bimbingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya anggota UP2K secara bertahap dan berkesinambungan yaitu kurangnya kerja sama antar anggota PKK dan rendahnya kapasitas/kemampuan Tim Penggerak PKK dalam melakukan kegiatan bimbingan sehingga menyebabkan

respon dan minat masyarakat pun rendah.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens antar anggota PKK melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan perlombaan yang dilakukan dari Pokja I sampai dengan Pokja IV, kegiatan pengajian, arisan, dan pertemuan rutin PKK serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan dengan pendapat Parsons, et al (Mardikanto dan Soebiato, 2017:161) bahwa:

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui kegiatan bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Selanjutnya Handini, et al (2019:184) menyatakan bahwa “Dengan kegiatan bimbingan yang terus-menerus, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.”

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan bimbingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya anggota PKK

secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mardikanto dan Soebiato serta Handini, et al, karena pada umumnya sampai sejauh ini belum terdapat kegiatan bimbingan yang diberikan untuk anggota PKK. Maka dari itu, diperlukan adanya kerja sama antara Tim Penggerak PKK dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bimbingan sehingga sasaran dan hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan bimbingan tersebut penting untuk dilaksanakan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya sehingga mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan bimbingan tersebut harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak dapat dilihat hanya dalam satu atau dua kali proses bimbingan, oleh karena itu harus dilakukan secara sistematis dan terarah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

- a. Tim Penggerak PKK memberikan motivasi terhadap masyarakat dalam memberdayakan UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pemberian motivasi untuk meningkatkan partisipasi anggota UPK dalam menjalankan program PKK sudah dilaksanakan, hal tersebut terlihat dari adanya arahan-arahan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dan sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat khususnya anggota UPK dalam program PKK sudah cukup baik.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2017:66) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan memerlukan fasilitator yang akan berperan atau bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Selanjutnya Anwas (2019:51) menyatakan bahwa:

Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pemberian motivasi untuk meningkatkan partisipasi anggota UPK dalam menjalankan program PKK sudah cukup optimal. Pemberian motivasi untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam program UP2K-PKK yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mardikanto dan Soebiato serta Anwas, karena adanya kegiatan diskusi dan arahan-arahan yang diberikan secara langsung oleh Tim Penggerak PKK kepada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program PKK. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang baik diharapkan mampu mendukung keberhasilan setiap program PKK yang dijalankan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal.

b. Tim Penggerak PKK melakukan pertemuan rutin dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan pengembangan program dan kelembagaan kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

dalam melaksanakan pertemuan rutin yang dilaksanakan untuk pemecahan suatu masalah sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan pertemuan rutin setiap bulannya di mana salah satu tujuannya yaitu untuk mencari solusi atau pemecahan terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Pemecahan suatu masalah tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi dan musyawarah secara bersama-sama dalam kegiatan pertemuan rutin seluruh PKK Desa.

Dalam hal ini, pertemuan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga eksistensi suatu organisasi atau kelembagaan kelompok, di mana pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan atau membahas suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama yang dilaksanakan secara teratur. Sebagaimana menurut Daft (2010:432) bahwa “Pengembangan organisasi berfokus terhadap aspek manusia dan sosial dari organisasi yang menjadi upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengadaptasi dan memecahkan masalah”.

Selanjutnya, Okvian dan Nawangsari (2019:62) menyatakan bahwa “Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kelembagaan kelompok untuk pemecahan suatu masalah yaitu melalui pertemuan rutin.”

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa

pertemuan rutin yang dilaksanakan untuk pemecahan suatu masalah yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Daft serta Okvian & Nawangsari, karena sejauh ini setiap permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik melalui kegiatan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dengan melibatkan seluruh anggota PKK Desa dan pihak lain dari Tim Penggerak PKK Kecamatan, dengan begitu diharapkan setiap program kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kendala yang serius sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

3. Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

- a. Tim Penggerak PKK dan Pemerintah Desa memfasilitasi bagi kelompok UP2K untuk memperoleh modal usaha yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan fasilitasi bagi masyarakat khususnya anggota UP2K untuk memperoleh modal usaha yang memadai belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut terlihat dari

masih banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dikarenakan belum adanya bantuan permodalan dari pemerintah desa sehingga modal usaha yang tersedia dalam kelompok UP2K-PKK masih terbatas dan hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat merasakan manfaatnya.

Hambatan yang timbul selama ini dalam fasilitasi bagi masyarakat khususnya kelompok UP2K-PKK untuk memperoleh modal usaha yang memadai yaitu kurangnya permodalan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh modal usaha yang memadai. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya bantuan dana dari pemerintah desa.

Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu Tim Penggerak PKK melakukan penggalangan dana secara swadaya dari setiap anggota PKK sebagai bentuk kas PKK yang bertujuan untuk membantu menunjang pelaksanaan program PKK.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan dengan pendapat menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:173) bahwa:

Pemupukan modal masyarakat adalah dengan tersedianya kredit yang memadai yang dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat digunakan

untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Selanjutnya, Mardikanto dan Soebiato (2017:173) menyatakan bahwa “Akses modal harus diartikan sebagai keterjangkauan yang memiliki dua sisi. Pertama, ada pada saat diperlukan, dan kedua, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya”.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa fasilitasi bagi masyarakat khususnya kelompok UP2K-PKK untuk memperoleh modal usaha yang memadai yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada prinsipnya belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mardikanto dan Soebiato, karena modal usaha yang tersedia masih sangat terbatas sehingga belum mampu menunjang kebutuhan masyarakat dalam memperoleh modal usaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Namun, sejauh ini Tim Penggerak PKK sendiri sudah berupaya untuk menciptakan modal usaha melalui kas PKK meskipun jumlahnya masih terbilang minim. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan Tim Penggerak PKK dalam menciptakan bantuan permodalan usaha yang memadai bagi masyarakat.

b. Tim Penggerak PKK memberikan sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk menunjang

kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kalangan perempuan belum maksimal, hal tersebut terlihat dari belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi seperti tempat dan peralatan produksi sehingga kegiatan produksi usaha masih dilakukan di rumah-rumah kader PKK dan peralatan yang digunakan sebagian besar masih menggunakan peralatan pribadi dari masyarakat itu sendiri.

Hambatan yang timbul selama ini dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota UP2K yaitu belum adanya sarana dan prasarana produksi yang memadai dikarenakan keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki sehingga sarana dan prasarana yang digunakan masih seadanya dan belum mampu menunjang kegiatan produksi usaha. Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul yaitu mengupayakan membeli peralatan produksi yang menjadi prioritas seperti mesin jahit dan spinner minyak serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan dengan pendapat menurut Dirlanudin, et al (2018:22) menyatakan bahwa:

Masyarakat desa sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar tumbuh dan berkembang dengan cepat. Perkembangan ekonomi desa memberikan peluang berusaha bagi masyarakat desa dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk menunjang kegiatan usaha program UP2K yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Dirlanudin, et al karena sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, bahkan masih minim sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan perekonomian desa dalam memberikan peluang berusaha bagi masyarakat dan menekan jumlah masyarakat miskin di desa.

4. Pengembangan Usaha Produktif

a. Adanya kegiatan usaha (*home industry*) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan usaha (*home*

industry) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kelompok UP2K belum berjalan maksimal, hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dijalankan oleh Pokja II. Namun kegiatan produksi usaha tersebut masih sangat jarang dilakukan dikarenakan terbatasnya dalam segi pemasaran produk. Kegiatan produksi akan dilakukan jika memang ada pesanan dari pembeli, sejauh ini sebagian besar pembelinya juga masih dari kader PKK itu sendiri dan dari masyarakat di lingkungan desa Buniseuri.

Hambatan yang timbul selama ini dalam kegiatan usaha (*home industry*) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kelompok UP2K yaitu rendahnya kemampuan Tim Penggerak PKK maupun masyarakat dalam pemasaran produk sehingga kegiatan usaha pun belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta rendahnya kemampuan masyarakat kelompok UP2K dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu melakukan berbagai cara pemasaran produk seperti dari mulut ke mulut (*word of mouth*), melalui warung-warung, rest area, dan kegiatan bazar. Kemudian, melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan

dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2017:76) bahwa:

Upaya pemberdayaan semestinya memfasilitasi dan mendorong masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mampu memanfaatkan sumberdaya produksi yang dimilikinya sehingga mampu memproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya, Anwas (2019:125) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha. Pemberdayaan dalam aspek ini justru yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui kegiatan usaha (*home industry*) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kelompok UP2K di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada prinsipnya belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mardikanto dan Soebiato serta Anwas, karena kegiatan usaha sejauh ini belum dilaksanakan secara berkelanjutan, kegiatan produksi akan dilakukan ketika terdapat pesanan dari *customer*. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya strategi pemasaran yang terarah sehingga kalangan perempuan belum mampu memproduksi secara efisien dan

menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Selain itu, Tim Penggerak PKK belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan usaha harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar tujuan dari kegiatan usaha tersebut tercapai yakni memperoleh *profit* (keuntungan) untuk membantu meningkatkan UMKM di Desa Buniseuri.

b. Tim Penggerak PKK memberikan strategi pemasaran yang terarah untuk pengembangan usaha kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kurang optimal dalam memberikan strategi pemasaran yang terarah untuk pengembangan usaha kelompok UP2K, hal tersebut dibuktikan dengan pemasaran yang dilakukan baru sebatas melalui bazar, sampai sejauh ini Tim Penggerak PKK belum menemukan strategi pemasaran yang dianggap efektif.

Hambatan yang timbul selama ini dalam strategi pemasaran yang terarah untuk pengembangan usaha kelompok UP2K yaitu adanya persaingan harga, produk usaha tidak memiliki brand sehingga belum dikenal oleh masyarakat, serta rendahnya kemampuan dan keahlian Tim Penggerak PKK maupun masyarakat (anggota UP2K) dalam melaksanakan pemasaran produk.

Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu melakukan pemasaran produk dari dari mulut ke mulut (word of mouth), melalui warung-warung, dan rest area di sekitaran Desa Buniseuri. Selain itu, melakukan pemasaran produk dalam setiap acara bazar yang bertujuan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan tidak sejalan dengan pendapat menurut Sumodiningrat (Mardikanto dan Soebiato, 2017:33- 34) bahwa:

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Selanjutnya, Anwas (2019:125) menyatakan bahwa:

Realitasnya tidak sedikit usaha kecil atau UKM memiliki produk yang bagus dan bernilai tinggi. Namun mereka sulit untuk memasarkan produknya. Pemasaran produk disamping terkait dengan kualitas produk, juga pengemasan dan promosi sangat menentukan. Oleh karena itu pelaku usaha kecil perlu memiliki kemampuan dalam pengemasan, promosi,

dan memasarkan produknya. Pemasaran produk ini bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau melalui kerja sama kemitraan. Agen pemberdayaan dituntut untuk mampu mendorong pelaku usaha kecil untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memasarkan produknya sehingga pemasarannya terarah.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemasaran yang terarah untuk pengembangan usaha kelompok UP2K yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sumodiningrat dan Anwas, karena pemasaran produk yang dilakukan masih sangat terbatas dan mengalami kesulitan, sejauh ini pemasaran dilakukan melalui kegiatan bazar yang mana kegiatan bazar tersebut juga jarang terselenggara, hanya diwaktu-waktu tertentu saja sehingga dapat dikatakan belum adanya aksesibilitas jaminan pemasaran yang mampu memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Tim Penggerak PKK maupun masyarakat (anggota UP2K) juga belum memiliki kemampuan dalam pengemasan dan promosi produk. Selain itu, belum adanya kerja sama kemitraan yang dilakukan sehingga sampai sejauh ini pemasarannya belum terarah yang

menyebabkan pendapatan yang dihasilkan juga masih minim. Maka dari itu, diperlukan berbagai upaya dalam menciptakan strategi pemasaran yang terarah seperti meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengemasan dan promosi produk sehingga dapat menarik perhatian konsumen serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

5. Penyediaan Informasi Tepat Guna

- a. Tim Penggerak PKK memberikan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota UP2K belum maksimal, hal tersebut terlihat dari promosi yang dilakukan baru sebatas melalui pemanfaatan media WhatsApp yang jangkauannya tidak terlalu luas dan masih jarang dilakukan.

Hambatan yang timbul selama ini dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota UP2K yaitu rendahnya kemampuan dan keahlian Tim Penggerak PKK dan masyarakat dalam menggunakan media sosial terutama sebagai sarana promosi. Selanjutnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan

yang timbul yaitu Tim Penggerak PKK berusaha mempelajari penggunaan berbagai media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk dari kalangan masyarakat muda.

Dalam hal ini, promosi merupakan salah satu bauran marketing yang sangat penting dalam keberhasilan pemasaran suatu produk maupun jasa. Tujuan promosi adalah agar semua konsumen mengetahui tentang produk atau jasa yang ditawarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, di zaman yang serba online dan digital seperti sekarang ini, dapat dikatakan bahwa cara promosi berbentuk online melalui pemanfaatan berbagai media sosial merupakan cara yang efektif dan efisien. Kegiatan promosi dengan cara tersebut diharapkan dapat menambah jumlah konsumen untuk dapat membeli produk yang dihasilkan.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan sejalan/tidak sejalan dengan pendapat menurut Okvian dan Nawangsari (2019:64) menyatakan bahwa:

Informasi yang tepat guna dapat dimanfaatkan sebagai media promosi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (pelaku usaha). Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya informasi tepat guna diharapkan dapat menaikkan angka penjualan.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan media sosial sebagai

sarana promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota UP2K yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Okvian dan Nawangsari, karena kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan melalui media sosial sejauh ini belum dapat dirasakan mampu menaikkan angka penjualan. Pemanfaatan media sosial yang dilakukan terlihat belum maksimal, karena cakupan pemanfaatannya juga belum dilakukan melalui berbagai media sosial yang ada, sebagian besar baru memanfaatkan media WhatsApp saja yang mayoritasnya digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan dari Tim Penggerak PKK maupun masyarakat dalam penggunaan media sosial..

- b. Tim Penggerak PKK melakukan kegiatan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat khususnya kelompok UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat khususnya anggota UP2K sudah cukup memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan sosialisasi untuk pemberian

informasi mengenai program PKK yang dilakukan baik secara langsung melalui kegiatan pengajian, arisan, dan pertemuan rutin maupun secara tidak langsung melalui media sosial sehingga setiap ada informasi dapat tersampaikan dengan baik dan menyeluruh sesuai dengan harapan masyarakat khususnya kalangan perempuan.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat dilapangan sejalan/tidak sejalan dengan pendapat menurut Tim Delivery (Mardikanto dan Soebiato, 2017:125-127) menyatakan bahwa:

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan informasi kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya kegiatan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat khususnya kalangan perempuan yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hal tersebut

dibuktikan dari adanya dialog antara Tim Penggerak PKK dengan masyarakat melalui kegiatan pengajaran, arisan, pertemuan rutin, dan media sosial yang membahas mengenai berbagai program PKK yang akan dilaksanakan sehingga terciptanya pemahaman masyarakat tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan tersebut. Ketika terciptanya pemahaman masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan maka diharapkan mampu meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat untuk dapat berpartisipasi demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian, pemberdayaan perempuan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diketahui belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari 10 indikator yang dijadikan tolok ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan baik dan 7 indikator lainnya belum sesuai dalam pelaksanaannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan UP2K Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Pemberdayaan UP2K Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal. Hal tersebut terlihat dari 10 indikator yang dijadikan tolak ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan optimal, yaitu adanya pemberian motivasi terhadap masyarakat, adanya pertemuan rutin dan monitoring evaluasi serta adanya kegiatan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat. Adapun 7 indikator lainnya belum berjalan optimal, seperti belum adanya kegiatan pendidikan dan bimbingan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok UP2K secara bertahap dan berkesinambungan, masih rendahnya fasilitasi bagi masyarakat khususnya kelompok UP2K untuk memperoleh modal usaha yang memadai, belum adanya sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok UP2K, belum adanya kegiatan usaha (*home industry*) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh kelompok UP2K, belum adanya strategi pemasaran yang terarah untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan kelompok UP2K, serta masih rendahnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh kelompok UP2K.

Adapun hambatan-hambatan yang timbul sesuai hasil wawancara dan hasil observasi dalam Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan UMKM Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap setiap program PKK, kurangnya kerja sama antar anggota PKK, belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan dan produksi.

Maka upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, antara lain melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi Tim Penggerak PKK, melaksanakan kegiatan diskusi dan arahan-arahan secara langsung kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program PKK, melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens antar anggota PKK melalui berbagai kegiatan, melakukan penggalangan dana secara swadaya dari setiap anggota PKK sebagai bentuk kas PKK yang bertujuan untuk membantu menunjang pelaksanaan program PKK, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produksi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Daft. 2010. *Era Baru Manajemen Jilid 1 Edisi Ke Sembilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handini, et al. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Mardikanto dan Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

- Dirlanudin, et al. 2018. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dukungan Sarana Prasarana*. *Jurnal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 2(1), 20-41. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/download/4756/5505>. (diakses 11 Juli 2023, pukul 21.09).
- Okvian, Regita Nur dan Nawangsari, Ertien Rining. 2019. *Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya*. *Public Administration Journal*, 1(2), 57-66. <http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/8/7>. (diakses 20 Juli 2023, pukul 05.01).
- Okvian, Regita Nur dan Nawangsari, Ertien Rining. 2019. *Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya*. *Public Administration Journal*,

- 1(2), 57-66.
<http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/8/7>. (diakses 20 Juli 2023, pukul 05.01).
- Supsilani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal*. Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 5(1), 20-30.<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/download/13172/11551>. (diakses 23 Juli 2023, pukul 19.14).
- Undang-Undang**
- Keputusan Kepala Desa Buniseuri Nomor 141.1/Kpts.04/II2017 tentang Pemberdayaan POKJA II Tim Penggerak PKK Desa Buniseuri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Nusahiang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (8).